

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran K. H. Abdurrahman Wahid di kancah perpolitikan Indonesia telah membawa suasana yang dinamis dan segar. Sehingga tidak mengherankan jika ia menjadi buruan para wartawan untuk dimintai pendapat dan komentarnya, ia menjadi sasaran kritik bagi para kritisi yang selalu mengkritik dan menyangkal pendapatnya, serta menjadi tumpuan dan tempat perlindungan bagi mereka yang sedang dalam kesulitan baik secara politik, ekonomi maupun kelompok minoritas lainnya yang merasa terancam keberadaannya. Gagasanya yang segar dan pikirannya yang jauh terkadang membuat masyarakat sulit untuk mengikuti dan memahaminya.¹ Seperti yang diungkapkan oleh Moeslim Abdurrahman kepada koran harian Kompas;

“Yang paling berkesan, saya lihat Gus Dur itu menjadi jendela bagi Nahdatul Ulama (NU) kepada dunia. karena diawal tahun 1970, dia sebagai orang muda pulang dari Timur Tengah, tiba-tiba bicara soal HAM, demokrasi dan seterusnya. Ini luar biasa. Orang ini bukan pulang dari Amerika Serikat seperti anak-anak muda sekarang ini yang sekolah di sana. Ia lama di Baghdad pernah di Mesir. Gus Dur ini sangat impresif karena dari rumpun subkultur pesantren, tapi dia bicara dalam wacana yang kontemporer.”²

K. H. Abdurrahman Wahid atau biasa disapa Gus Dur³ terpilih sebagai presiden dan Megawati sebagai wakil presiden dalam sidang umum MPR tanggal

¹ Al-Zastrow N.G, *Gus Dur Siapasih Sampeyan: Tafsir Teoritik atas Tindakan dan Pernyataan Gus Dur*, (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm. 1.

² Moeslim Abdurrahman, “*Dia Adalah Jendela Kepada Dunia*”, Koran Harian Kompas, ed. 31 Desember 2009. Dalam: Irwan Suhanda, *Santri Par Excellence*, (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 20.

³ Pada pemaparan selanjutnya penulis akan menggunakan nama Gus Dur untuk penyebutan nama Presiden K. H. Abdurahman Wahid.

20 Oktober 1999. Kepemimpinan mereka memberi harapan yang besar bagi bangsa Indonesia. Indonesia yang pada waktu itu dilanda krisis ekonomi dan politik sangat menanti perbaikan yang akan dilakukan oleh pasangan Gus Dur-Megawati.⁴ Ada sejumlah faktor mengapa harapan masyarakat sangat besar terhadap kepemimpinan Gus Dur-Megawati. Pertama, untuk pertama kalinya pemilihan presiden dan wakil presiden dipilih oleh anggota MPR secara demokratis pada pemilu tahun 1999 yang berlangsung damai dan tanpa tekanan, kecuali pemilihan pasangan Soekarno-Hatta yang dipilih secara aklamasi oleh anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Kedua, Gus Dur dan Megawati merupakan kombinasi dari golongan bangsa yang terpenting yaitu Islam di satu pihak dan golongan nasional dipihak lainnya.⁵

Adapun ayat yang berkaitan dengan kepemimpinan, yang menjadi dasar dari penelitian penulis menurut Al-Quran adalah sebagai berikut;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
 وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. An-Nisa: 59).

⁴ Dudi Sugandi, “Gus Dur Mampu Redam Gejolak”, Bandung: Koran Harian Umum Pikiran Rakyat, ed. Jumat 22 Oktober 1999, hlm. 1.

⁵ Riza Sihbudi, *Bara dalam Sekam: Identifikasi Masalah dan Solusi atau Konflik-konflik Lokal di Aceh, Maluku, Papua dan Riau*, (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 17.

Dengan adanya ayat ini , semakin menguatkan bahwa adanya pemimpin itu sangat penting, selain itu kita juga harus patuh kepada pemimpin karena mematuhi pemimpin atau ulil amri adalah suatu keharusan seperti yang tercantum dalam ayat di atas, tentu saja jangan sampai berlainan dengan syara.

Upaya Gus Dur dalam memenuhi harapan bangsa Indonesia adalah dengan membuat beberapa kebijakan yang diantaranya adalah membentuk kabinet kerja yang diberi nama dengan Kabinet Persatuan Nasional, yang disebutnya sebagai kabinet yang lebih ramping karena dalam Kabinet Persatuan Nasional telah dihapuskan dua departemen yaitu Departemen Sosial dan Departemen Penerangan.⁶ Adapun alasan dari dihapuskannya Departemen Penerangan menurutnya adalah departemen ini merupakan alat yang efektif untuk mengendalikan penerbitan dan pemberitaan dalam media pada masa kepemimpinan Soeharto, sehingga keberadaan departemen ini dikhawatirkan memiliki hubungan dengan pemerintahan sebelumnya.⁷

Namun, kebijakannya ini malah menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan dan dianggap sebuah kontroversi. Azyumardi Azra bahkan mengungkapkan, Presiden K. H. Abdurahman Wahid atau biasa disapa Gus Dur adalah presiden yang kontroversial dan penuh paradoks. Berbagai kontroversi yang dimunculkan tidak hanya menimbulkan kegalauan dan kegaduhan politik di

⁶ PR Jakarta, "Pegawai Deppen Menolak diPindah", Bandung: Koran Harian Umum Pikiran Rakyat, ed. Sabtu 30 Oktober 1999, hlm. 1.

⁷ Yastri Yustina, *Kebijakan Politik Gus Dur Sebagai Presiden RI ke-4 Terhadap Referendum Aceh*, skripsi, (Jakarta: Fakultas Adab dan Humaniora Uin Syarif Hidayatullah, 2008), hlm. 12.

kalangan masyarakat, tetapi akhirnya membuat ia terpental dari kursi kepresidenan karena mengalami *impeachment* dari MPR.⁸

Selain pembubaran Departemen Sosial dan Departemen Penerangan yang kontroversial. Kebijakan yang ia keluarkan yang menyita perhatian publik diantaranya adalah ketika ia menangani konflik antara pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM)⁹ dengan menyikapinya secara lunak dan toleran. Tindakan ini tentu saja sangat berdampak pada keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta memberikan pandangan negatif terhadap Gus Dur yang baru saja dilantik menjadi presiden.¹⁰ Adapun kebijakannya di Aceh yaitu dengan memberikan Jeda Kemanusiaan di Aceh dan memberikan janji kepada GAM bahwa Gus Dur akan melakukan referendum di Aceh. Gus Dur menginginkan penyelesaian konflik dengan Aceh dilakukan dengan dialog bukan dengan kekerasan.¹¹

Sri Bintang Pamungkas mengkritik kebijakan yang telah Gus Dur buat, menurutnya di Aceh perlu bantuan semacam *Marshal Plan* untuk membangun kembali Aceh yang rusak oleh perang dengan biaya negara. Lewat empat hal, *one and for all* soal Aceh akan segera reda, dan rakyat Aceh niscaya tidak akan

⁸ Azyumardi Azra, "Bulldoser Menuju Konsolidasi Demokrasi", Jakarta: Koran Harian Umum Kompas, ed. 28 Desember 2004. Dalam: Irwan Suhanda, *Santri Par Excellence*, (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 147.

⁹ Pada pemaparan selanjutnya penulis akan menuliskan GAM untuk Gerakan Aceh Merdeka.

¹⁰ Laurentius Rigen Daris, *Kebijakan-kebijakan Presiden Abdurahman Wahid Tahun 1999-2001*, skripsi, (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2016), hlm. 15.

¹¹ Hasanuddin Yusuf Adan, *Tamaddun dan Sejarah: Etnografi Kekerasan di Aceh*, (Yogyakarta: Prisma Sophie Pers, 2003), hlm. 162-163.

mengorbankan jiwa lagi menuntut kemerdekaan dan “lepas dari RI”. Sebab dengan otonomi penuh dan luas itu, pada hakekatnya mereka telah “merdeka” pula.¹²

Gus Dur juga mengeluarkan Keppres No. 6 Tahun 2000 yang isinya mencabut Inpres No. 14 Tahun 1967 yaitu dengan mengizinkan Etnis China untuk merayakan tahun baru Imlek secara terbuka. Adanya Keppres No. 6 Tahun 2000, membuat pertunjukan Barongsai ditampilkan dimasyarakat umum dan hotel-hotel ternama.¹³

Dari pemaparan diatas penulis sangat tertarik untuk meneliti kebijakan Gus Dur yang kontroversial. Adapun kebijakan-kebijakan kontroversial yang dikeluarkan oleh Gus Dur yang akan penulis bahas adalah kebijakan Gus Dur terhadap Penandatanganan Nota Kesepahaman (Jeda Kemanusiaan) Pemerintah Republik Indonesia (RI) dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), kebebasan beragama bagi Etnis Cina, serta dibubarkannya Departemen Penerangan, Alasan penulis memilih kebijakan-kebijakan Gus Dur untuk dibahas yaitu, *Pertama*, karena Gus Dur merupakan sosok yang kontroversial dan khas. Tidak hanya dalam lingkup NU, namun dalam lingkup ke-Indonesia-an.¹⁴ Seperti yang dipaparkan dalam buku *Tabayyun Gus Dur...*;

“Tambun dan mata tertutup seperti tidur. Itulah ciri khas penampilan fisik Ketua PBNU Abdurrahman Wahid. Sementara, ciri lainnya: tingkah laku, komentar dan pendapatnya kerap memancing kontroversi. Sehingga, tak mengherankan bila ia dinilai sebagai kiai nyeleneh. Kendati tak kehilangan citarasa ke-NU-annya, kiai lulusan Fakultas Sastra Universitas Bagdad, Irak, itu sering sangat maju, bahkan dibandingkan dengan "orang maju" sekalipun.”¹⁵

¹² Sri Bintang Pamungkas, *Dari Orde Baru ke Indonesia Baru Lewat Reformasi Total*, (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm. 94.

¹³ Milly Malia, “Menikmati Sajian Barongsai di Hotel Berbintang”, Bandung: Koran Harian Umum Pikiran Rakyat, ed. Senin 7 Februari 2000, hlm. 2.

¹⁴ Listiyono Santoso, *Teologi Politik Gus Dur*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2004), hlm. 67.

¹⁵ M. Shaleh Isre, *Tabayun Gus Dur: Pribumisasi Islam, Hak Minoritas, Reformasi Kultural*, (Yogyakarta: LKiS, 1998) hlm. 27.

Penampilan fisik tentu bukan menjadi hambatan agar terus memberikan pendapat dan kritik yang dapat membuka mata masyarakat Indonesia agar tidak tertipu lagi dengan tipu muslihat perpolitikan yang terjadi. Itulah sedikit inti dari kutipan di atas. Pemikirannya yang maju banyak memberikan inspirasi bagi banyak kalangan, tak heran ia menjadi kiyai yang berbeda dengan kiyai lainnya, sehingga ia selalu disegani. Kajian tentang tindakan dan pemikirannya tentu menjadi sesuatu yang sangat menarik.

Kedua, penulis menganggap bahwa ketiga kebijakan yang telah Gus Dur keluarkan sangat berdampak hasilnya hingga sekarang. Oleh karena itu, pembahasan mengenai pentingnya ketiga kebijakan tersebut dikeluarkan perlu untuk dibahas.

Ketiga penelitian mengenai Gus Dur kebijakan Gus Dur yang kontroversial masih kurang, namun bahasan mengenai pemikirannya banyak yang sudah mengkajinya, diantaranya yaitu; skripsi yang disusun oleh Aida Ruslita tahun 2007, mengenai *Pemikiran Politik K. H. Abdurahman Wahid (1985-1999)* dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung, skripsi karya Padil yang disusun tahun 2016, mengenai *Pemikiran K. H. Abdurahman Wahid Tentang Pluralisme (1999-2009)* dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung, skripsi karya Rizal Abdul Aziz yang disusun tahun 2016, *Gus Dur dan Awal Reformasi (1999-2001)*, dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Selain itu, karena kebijakan merupakan tolak ukur dalam menilai kepemimpinan seseorang, sehingga kebijakan yang dikeluarkan perlu untuk diteliti. Walaupun ada yang mengkaji tentang kebebasan beragama bagi etnis China namun di dalamnya tidak dijelaskan secara rinci mengenai pro-kontra dari

beberapa kalangan. Adanya penelitian ini adalah untuk melengkapi penelitian yang sudah ada dengan membahas sebab kebijakan tersebut dibuat, proses kebijakan itu dibuat, implikasi adanya kebijakan tersebut dan pro-kontra adanya kebijakan tersebut.

Dengan demikian judul penelitian ini adalah: **Kebijakan-kebijakan Presiden K. H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang Kontroversial Tahun 1999-2001**. Adanya penelitian ini adalah untuk melengkapi penelitian sebelumnya, sehingga kita dapat memahami kebijakan Gus Dur secara menyeluruh.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi objek penulisan ini. Adapun permasalahan itu diantaranya adalah:

1. Bagaimanakah Biografi Presiden K. H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur)?
2. Bagaimanakah Kebijakan-kebijakan Presiden K. H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang Kontroversial Tahun 1999-2001?

C. Tujuan Pembahasan

Penulisan ini secara umum diarahkan untuk menjawab berbagai masalah yang berkaitan dengan Kebijakan-kebijakan Presiden K. H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang Kontroversial Tahun 1999-2001. Maka dari itu penulisan ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui Biografi Presiden K. H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur)
2. Mengetahui Kebijakan-kebijakan Presiden K. H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang Kontroversial Tahun 1999-2001.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka sangat penting dilakukan karena untuk menentukan landasan utama dalam penelitian yang penulis tulis ini. Dalam penelusuran kepustakaan yang penulis ketahui, kajian mengenai kebijakan-kebijakan presiden Gus Dur selama menjabat menjadi presiden antara tahun 1999-2001 memang telah banyak yang mengkaji namun, kebanyakan kajiannya difokuskan dalam satu kebijakan yang Gus Dur keluarkan, sehingga adanya penelitian ini adalah untuk melengkapi penelitian sebelumnya. Adapun karya ilmiah ataupun buku yang berkaitan dengan penelitian penulis dan menjadi referensi penulis diantaranya adalah:

1. Buku yang ditulis oleh A-Zastrow Ng. yang berjudul “Gus Dur Siapasih Sampeyan?: Tafsir Teoritis atas Tindakan dan Pernyataan Gus Dur” diterbitkan pada tahun 1999 oleh Penerbit Erlangga di Jakarta, merupakan buku yang memaparkan tindakan-tindakan dan pernyataan-pernyataan Gus Dur yang dikaji lebih mendalam dalam ulasan yang lebih ilmiah. Alasan dibuatnya buku ini adalah karena Al-Zastrow merasa bahwa setiap yang dilakukan dan dinyatakan oleh Gus Dur adalah penggalan-penggalan sejarah yang memiliki makna yang besar dalam kehidupan berbangsa dan beragama. Perbedaan dengan penelitian yang penulis susun yaitu, penulis menyusun penelitian ini dengan memaparkan bagaimana pro-kontra dan implikasi terhadap kebijakan yang Gus Dur keluarkan.
2. Buku yang berjudul “Dari Orde Baru ke Indonesia Baru lewat Reformasi Total” yang ditulis oleh Sri Bintang Pamungkas, yang diterbitkan oleh Erlangga pada tahun 2001 di Jakarta. Buku yang ditulis oleh Sri Bintang

Pamungkas merupakan buku yang menjelaskan tentang pentingnya dilakukan reformasi total serta kritik-krtik dan solusi terhadap sistem pemerintahan yang sudah tidak beraturan (masa Orde Baru). Buku ini menjelaskan bagaimana perbedaan antara sistem dan kebijakan, menurut buku ini sistem didentikan dengan bangunan rumah, maka kebijakan identik dengan perobotan di dalamnya. Namun, Buku ini hanya menjelaskan secara singkat bagaimana kepemimpinan Gus Dur dan lebih fokus pada sistem pemerintahan sehingga isinya sangat berbeda dengan penelitian yang penulis susun. Disamping itu semua, buku ini sangat membantu penulis dalam menyusun laporan ini, karena dengan adanya buku ini penulis dapat mengetahui situasi politik pada masa itu dan didalam buku ini dipaparkan mengenai kritikan Sri Bintang Pamungkas terhadap pemerintahan atau kebijakan Gus Dur.

3. Skripsi “Kebijakan-kebijakan Presiden Abdurahman Wahid Tahun 1999-2001” yang ditulis pada tahun 2016 oleh Laurentius Rigen Daris dari Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Skripsi ini dibagi menjadi empat bagian fokus pembahasan diantaranya yaitu, latar belakang kehidupan Abdurahman Wahid, kebijakan-kebijakan Abdurahman Wahid dalam bidang sosial, politik, ekonomi dan budaya, jasa-jasa Aburahman Wahid bagi Indonesia dan yang terakhir analisi kebijakan presiden Abdurahman Wahid tahun 1999-2000. Skripsi ini menjelaskan secara detail mengenai kebijakan yang diberikan oleh Gus Dur namun, skripsi ini tidak menjelaskan mengenai implikasi dari kebijakan yang ditetapkan Gus Dur. Sehingga penulis merasa bahwa penelitian ini memang penting untuk melengkapi penelitian

sebelumnya. Skripsi ini sangat membantu penulis dalam menyusun penelitian ini, karena skripsi ini dapat dijadikan referensi dalam menulis penelitian penulis.

4. Skripsi yang ditulis oleh Ali Mustajab yang berjudul “Kebijakan Politik Gus Dur Terhadap China Tionghoa di Indonesia”, diterbitkan pada 2015, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. Skripsi ini memaparkan bagaimana Gus Dur mampu mengubah dan mewujudkan keinginan kaum minoritas khususnya etnis Tionghoa, dengan memberlakukan kebijakan yang membebaskan gerak serta aktifitas etnis Tionghoa. Skripsi ini memfokuskan kajiannya terhadap kebijakan-kebijakan yang diberlakukan Gus Dur kepada etnis Tionghoa, sehingga dapat menambah wawasan penulis mengenai kebijakan-kebijakan Gus Dur dalam bidang selain sosial, politik, budaya dan Ekonomi.
5. Skripsi yang disusun oleh Yastri Yustina, “Kebijakan Politik Gus Dur Sebagai Presiden RI ke-4 Terhadap Referendum Aceh”, Jakarta: Fakultas Adab dan Humaniora Uin Syarif Hidayatullah, 2008. Skripsi ini memfokuskan kajiannya pada referendum Aceh, sehingga pembahasan mengenai GAM tidak terlalu banyak disinggung yang tentunya menjadi perbedaan tersendiri bagi penelitian yang sedang penulis susun.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa, buku-buku dan karya ilmiah tersebut memiliki fokus kajian yang berbeda dengan penelitian yang disusun oleh penulis, karena buku-buku dan karya ilmiah tersebut tidak menyinggung terlalu banyak mengenai kebijakan Gus Dur yang kontroversial serta didalamnya tidak dijelaskan mengenai sebab kebijakan tersebut dibuat, proses kebijakan

tersebut dibuat, pro-kontra adanya kebijakan tersebut dan implikasi dari adanya kebijakan tersebut. Maka dari itu penelitian ini penting untuk dilakukan karena untuk melengkapi penelitian sebelumnya.

E. Metode Penelitian

1. Heuristik

Heuristik adalah kegiatan mencari sumber untuk mendapatkan data-data atau materi sejarah atau evidensi sejarah. Dalam metode penelitian sejarah, tahapan heuristik merupakan tahapan pertama. Dalam penelusuran sumber yang akan digunakan dalam penelitian menggunakan sumber-sumber yang berupa sumber tertulis, sumber lisan dan sumber benda yang relevan dengan judul penelitian. Sumber yang penulis dapatkan saat ini adalah berasal dari perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, DISBAPUSIPDA, Batu Api, Balai Iklan Pikiran Rakyat dan Palasari. Adapun Sumber yang didapatkan penulis selama penelusuran sumber yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

a. Sumber Primer:

1) Buku:

- a) Siswono Jokohusodo. 1985. *Warga Baru, Kasus Cina di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Yayasan Padamu Negeri.
- b) Junus Jahja. 1983. *Garis Rasial Garis Usang, Lika-liku Pembaharuan*. Jakarta: BAKOM PKB.
- c) Ellyasa KH. Darwis. 1994. *Gus Dur: NU dan Masyarakat Sipil*. Yogyakarta:LKiS.

- d) Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam. 1997. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- e) M. Shaleh Isre. 1998. *Tabayun Gus Dur: Pribumisasi Islam, Hak Minoritas, Reformasi Kultural*. Yogyakarta: LKiS.
- f) Ahmad Amir Aziz. 1999. *Neo-modernisme Islam di Indonesia Gagasan Sentral Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- g) Al-Zastrow N.G. 1999. *Gus Dur Siapasih Sampeyan: Tafsir Teoritik atas Tindakan dan Pernyataan Gus Dur*, Jakarta: Erlangga.
- h) Riza Sihbudi, 2000, *Bara dalam Sekam: Identifikasi Masalah dan Solusi ata Konflik-konflik Lokal di Aceh, Maluku, Papua dan Riau*, Bandung: Mizan.
- i) Leo Suryadinata. 2000. *Negara dan Etnis Tionghoa Kasus Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- j) Budiarto Danudjaja. 2001. *Hari-hari Indonesia Gus Dur*. Yogyakarta: Galang Press.
- k) Sri Bintang Pamungkas, 2001, *Dari Orde Baru ke Indonesia Baru lewat Reformasi Total*, Jakarta: Erlangga.
- l) Setiono G Benny. 2002. *Tionghoa dalam Pusaran Politik*. Jakarta: Elkasa.
- m) Abdul Ghofur. 2002. *Demokratisasi dan Prospek Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- n) Greg Barton. 2003. *The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*. Yogyakarta: LKiS.
- o) Adan Hasanuddin Yusuf. 2003. *Tamaddun dan Sejarah: Etnografi Kekerasan di Aceh*. Yogyakarta: Prisma Sophie Pers.
- p) H. Hasan Bashri. 2003. *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh, Problem, Solusi dan Implementasi*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- q) Pahrurroji M. Bukari. 2003. *Membebaskan Agama dari Negara: Pemikiran Abdurrahman Wahid dan Ali 'Abd ar-Raziq*. Jakarta: Pondok Edukasi.
- r) A. Rani Usman. 2003. *Sejarah Peradaban Aceh*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- s) P. N. H Simajuntak. 2003. *Kabinet-kabinet Republik Indonesia: dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi*. Jakarta: Djabatan.
- t) A. Muhaimin Iskandar. 2004. *Gus Dur yang Saya Kenal: Sebuah Catatan Tentang Transisi Demokrasi Kita*. Yogyakarta: LKiS.
- u) Listiyono Santoso. 2004. *Teologi Politik Gus Dur*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- v) Anthony Reid. 2005. *Asal Mula Konflik Aceh*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- w) Subarso. 2006. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

x) Wayne Parsons. 2008. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, ed. I, cet. Ke-3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

2) Arsip atau Dokumen:

- a) UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah.
- b) UU No. 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi dan internet.
- c) UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers yang menghilangkan SIUP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers).
- d) UU No. 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan provinsi daerah Istimewa Aceh.
- e) Keppres No. 153 Tahun 1999 tentang membentuk badan informasi dan komunikasi menggantikan UU sebelumnya.
- f) Keppres No. 6 Tahun 2000 tentang pencabutan instruksi presiden nomor 14 tahun 1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat cina.
- g) Inpres No.4 tahun 2001 tentang langkah-langkah komprehensif dalam rangka penyelesaian masalah Aceh.
- h) Inpres No. 6 Tahun 2001 tentang Penggunaan dan pendayagunaan telematika.

3) Media Cetak:

- a) Penulis Hikmah, “Mencermati Manuver Gus Dur”, Hikmah 16 Januari 1999, ed. Minggu 1.

- b) Dudi Sugandi, “Gus Dur Mampu Redam Gejolak”, Bandung: Koran Harian Umum Pikiran Rakyat, ed. Jumat 22 Oktober 1999.
 - c) Pikiran Rakyat, “Khawatir seperti Nasib Bekas Karyawan BP7: Pegawai Deppen Menolak diPindah”, Jakarta: Koran Harian Pikiran Rakyat, ed. Sabtu, 30 Oktober 1999 .
 - d) Pikiran Rakyat Jakarta, “Pegawai Deppen Menolak diPindah”, Bandung: Koran Harian Umum Pikiran Rakyat, ed. Sabtu 30 Oktober 1999.
 - e) Dr. H. Zamakhsyari Dhofier M. A, “Gus Dur adalah Ekspresi dan Tradisi Pesantren”. D & R, ed. 8-14 November 1999.
 - f) K. H. Hasyim Muzadi, ”Kepemimpinan Gus Dur Sudah Mewakili Ruh NU”. Bandung: Koran Harian Pikiran Rakyat, ed. Jumat 24 Maret 2000.
 - g) Penulis Hikmah, “Pemerintah Tak Bisa Tunda Soal Aceh”, Majalah Hikmah, Ed. Minggu Ke III, November 1999, hlm. 6.
 - h) Penulis Kompas, “Obrolan Gus Dur dihari Jumat”, Jakarta: Koran Harian Kompas, Sabtu, 26 Februari 2000, hlm. 1.
 - i) Milly Malia, “Menikmati Sajian Barongsai di Hotel Berbintang”, Bandung: Koran Harian Umum Pikiran Rakyat, ed. Senin 7 Februari 2000.
- 4) Sumber lisan
- a) Prof. Dr. K. H. Said Aqil Siroj, 65 tahun, Ketua Umum PBNU periode 2010-2020.

- b) K. Yoyon Sofyan, 54 tahun, Pemimpin Pondok Pesantren An-Nur Kuningan.
- c) Nanang Supriatna, 52 Tahun, wartawan di Majalah Galura.
- d) K. H. Ali Asy'ari, 72 tahun, mantan pengurus PCNU kab. Kuningan Jawa Barat.

b. Sumber Sekunder:

1) Buku:

- a) Hasanuddin Yusuf Adan. 2003. *Tamaddun dan Sejarah: Etnografi Kekerasan di Aceh*, Yogyakarta: Prisma Sophie Pers.
- b) Masduki. 2007. *Regulasi Penyiaran: dari Otoriter ke Liberal*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara.
- c) Fachry Ali. 2008. *Kalla dan Perdamaian Aceh*. Lembaga Study dan Pengembangan Etika Usaha Indonesia.
- d) Moch Nurhasim. 2008. *Konflik dan Integritas Politik Gerakan Aceh Merdeka: Kajian Tentang Konsensus Normatif antara RI-GAM dalam Perundingan Helinski*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- e) Musni Umar. 2008. *Aceh Win-win Solution Penyelesaian Aceh*. Jakarta: Forum Kampus Kuning.
- f) M. Hamid. 2010. *Gus Dur: Bapak Pluraisme & Guru Bangsa*, Yogyakarta: Pustaka Marwa.
- g) Maman Imanulhaq Faqih. 2010. *Fatwa dan Canda Gus Dur*. Jakarta: Kompas.

- h) Abdul Hamid dan Yaya. 2010. *Pemikiran Modern Dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- i) David Jenkins. 2010. *Soeharto dan Barisan Jendral Orde Baru: Rezim Militer Indonesia 1975-1983*. Yogyakarta: Komunitas Bambu.
- j) Moh. Mahfud M. D. 2010. *Setahun Bersama Gus Dur: Kenangan Menjadi Menteri di Saat Sulit*. Jakarta: Grafindo Persada.
- k) Irwan Suhanda. 2010. *Santri Par Excellence*. Jakarta: Kompas.
- l) Qahar Muzakar dan Mellyan. 2011. *Fakta Bicara: Mengungkap pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005*. Banda Aceh: Koalisi NGO HAM Aceh.
- m) Choirul Mahmud. 2013. *Manifesto Politik Tionghoa di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- n) Darmansjah Djumala. 2013. *Soft Power untuk Aceh: Resolusi Konflik dan Politik Desentralisasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- o) Bakti Putra Dwivianto. 2016. *Pengaruh Kebijakan Mengenai Etnis Tionghoa di Indonesia era Pemerintahan Abdurrahman Wahid terhadap Hubungan Bilateral Indonesia dan Tiongkok*. Universitas Airlangga.

2) Karya Ilmiah

- a) Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, “Aceh: Mengapa Kesepakatan Penghentian Permusuhan Sulit diPertahankan”, Elsam: Briefing Paper No. 2, 30 April 2003.
- b) Muhammad Bahron. 2003. *Kebijakan Program Benteng Masa Demokrasi Liberal 1950-1957*. Jember: Skripsi S1 Fakultas Sastra Universitas Jember.
- c) Yastri Yustina. 2008. *Kebijakan Politik Gus Dur Sebagai Presiden RI ke-4 Terhadap Referendum Aceh*. Skripsi. Jakarta: Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah.
- d) Dwi Wahyonohadi dan Gayung Kasuma. *Propaganda Ore Baru 1966-1980*, Jurnal Propaganda, ed. Desember 2012.
- e) Marini Partini Mieri A. Dahana. 2014. “Analisis Pengaruh Kepemimpinan Gus Dur Terhadap Masyarakat Tionghoa di Indonesia”.
- f) Nur Hidayah dan Retno Winarni. 2014. “Pengaruh Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Kehidupan Etnis Tionghoa di Bidang Politik, Sosial, Budaya dan Ekonomi di Kabupaten Jember Dari Zaman Orde Lama Sampai Reformasi Pada Tahun 1998-2012”. Jember:Fakultas Sastra Universitas Jember.
- g) Laurentius Rigen Daris. 2016. *Kebijakan-kebijakan Presiden Abdurahman Wahid Tahun 1999-2001*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.

- h) Abdullah Ramdhani dan Muhammad Ali Ramadhani. 2017. “Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Umum, Jurnal Publik”, Jurnal Politik. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

3) Sumber internet

- a) <http://kbbi.kemdikbud.go.id>. Diakses pada tanggal 02 Desember 2017, pukul 16:29 WIB.
- b) A. Wahyudi. *Implementasi rencana strategis badan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam upaya pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* , 2(2), 101-105. Retrieved from <http://ejournalfia.ub.ac.id>.
- c) www.KBBI.com. Diakses pada tanggal 02 Desember 2017, pukul 16:30 WIB.
- d) pukul 17: 45 WIB.
- e) Coki Lubis, 05 Desember 2016, “Gus Dur Sang *Pembela* Kebebasan Pers” <http://telusur.metrotvnews.com>. Diakses pada tanggal 08 Juni 2018, pukul 22: 01 WIB.

2. Kritik

Tahapan kedua dari metode sejarah adalah tahapan kritik, yaitu proses verifikasi sumber yang telah didapatkan untuk memperoleh otentisitas dan kredibilitas dari sumber tersebut. Adapun tahapan kritik ini terbagi menjadi dua, yaitu kritik eksternal yang berkaitan dengan otentisitas atau keaslian sumber dan kritik internal yang berkaitan dengan kredibilitas sumber.

a. Kritik Ekstern

Dalam hal kaitannya dengan kritik eksternal yang dilakukan untuk menentukan otentisitas sumber yang diteliti, yaitu otentik atau tidaknya, utuh atau tidaknya, ataupun asli atau palsu sumber tersebut. Peneliti melakukan pengujian atas asli atau tidaknya sumber tersebut dengan menyeleksi segi-segi fisik dari sumber yang ditemukan. Bila sumber itu merupakan dokumen tertulis, maka harus diteliti kertasnya, tintanya, gaya tulisannya, bahasanya, kalimatnya, ungkapannya, kata-katanya, hurufnya dan segi penampilannya yang lain otentisitas itu minimal diuji berdasarkan lima pertanyaan pokok, yaitu: 1) kapan sumber itu dibuat? 2) dimana sumber itu dibuat? 3) siapa yang membuat? 4) dari bahan apa sumber itu dibuat? 5) apakah sumber itu dalam bentuk asli?¹⁶

1) Sumber Primer:

a) Buku:

- (1) Siswono Jokohusodo. 1985. *Warga Baru, Kasus Cina di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Yayasan Padamu Negeri.
- (2) Junus Jahja. 1983. *Garis Rasial Garis Usang, Lika-liku Pembaharuan*. Jakarta: BAKOM PKB.
- (3) Ellyasa KH. Darwis. 1994. *Gus Dur: NU dan Masyarakat Sipil*. Yogyakarta: LKiS.
- (4) Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam. 1997. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

¹⁶ Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011), hlm. 59-60.

- (5) M. Shaleh Isre. 1998. *Tabayun Gus Dur: Pribumisasi Islam, Hak Minoritas, Reformasi Kultural*. Yogyakarta: LKiS.
- (6) Ahmad Amir Aziz. 1999. *Neo-modernisme Islam di Indonesia Gagasan Sentral Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- (7) Al-Zastrow N.G. 1999. *Gus Dur Siapasih Sampeyan: Tafsir Teoritik atas Tindakan dan Pernyataan Gus Dur*, Jakarta: Erlangga.
- (8) Riza Sihbudi, 2000, *Bara dalam Sekam: Identifikasi Masalah dan Solusi ata Konflik-konflik Lokal di Aceh, Maluku, Papua dan Riau*, Bandung: Mizan.
- (9) M. Isa Sulaiman. 2000. *Aceh Merdeka Ideologi, Kepemimpinan dan Gerakan*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- (10) Leo Suryadinata. 2000. *Negara dan Etnis Tionghoa Kasus Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- (11) Budiarto Danudjaja. 2001. *Hari-hari Indonesia Gus Dur*. Yogyakarta: Galang Press.
- (12) Sri Bintang Pamungkas, 2001, *Dari Orde Baru ke Indonesia Baru lewat Reformasi Total*. Jakarta: Erlangga.
- (13) Setiono G Benny. 2002. *Tionghoa dalam Pusaran Politik*. Jakarta: Elkasa.
- (14) Abdul Ghofur. 2002. *Demokratisasi dan Prospek Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- (15) Greg Barton. 2003. *The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*. Yogyakarta: LKiS.
- (16) Hasanuddin Yusuf Adan. 2003. *Tamaddun dan Sejarah: Etnografi Kekerasan di Aceh*. Yogyakarta: Prisma Sophie Pers.
- (17) H. Hasan Bashri. 2003. *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh, Problem, Solusi dan Implementasi*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- (18) Pahrurroji M. Bukari. 2003. *Membebaskan Agama dari Negara: Pemikiran Abdurrahman Wahid dan Ali 'Abd ar-Raziq*. Jakarta: Pondok Edukasi.
- (19) A. Rani Usman. 2003. *Sejarah Peradaban Aceh*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- (20) P. N. H Simajuntak. 2003. *Kabinet-kabinet Republik Indonesia: dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi*. Jakarta: Djabatan.
- (21) A. Muhaimin Iskandar. 2004. *Gus Dur yang Saya Kenal: Sebuah Catatan Tentang Transisi Demokrasi Kita*. Yogyakarta: LKiS.
- (22) Listiyono Santoso. 2004. *Teologi Politik Gus Dur*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- (23) Anthony Reid. 2005. *Asal Mula Konflik Aceh*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- (24) Subarso. 2006. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- (25) Wayne Parsons. 2008. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, ed. I, cet. Ke-3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Semua buku yang didapatkan terbuat dari kertas HVS yang ditulis dengan tinta hitam, diketik menggunakan komputer dan menggunakan huruf Times New Roman yang berukuran 12. Buku-buku tersebut didapatkan dari perpustakaan DISBAPUSIPDA, perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Batu Api dan Palasari.

b) Arsip dan Dokumen:

- (1) UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah.
- (2) UU No. 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi dan internet.
- (3) UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers yang menghilangkan SIUP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers).
- (4) UU No. 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan provinsi daerah Istimewa Aceh.
- (5) Keppres No. 153 Tahun 1999 tentang membentuk badan informasi dan komunikasi menggantikan UU sebelumnya.
- (6) Keppres No. 6 Tahun 2000 tentang pencabutan instruksi presiden nomor 14 tahun 1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat cina.
- (7) Inpres No.4 tahun 2001 tentang langkah-langkah komprehensif dalam rangka penyelesaian masalah Aceh.

(8) Inpres No. 6 Tahun 2001 tentang Penggunaan dan pendayagunaan telematika.

Semua arsip yang telah disebutkan diatas didapatkan dari website resmi sekretaris negara atau SIPPU. Website ini memuat semua undang-undang, perpu, keppres, dan inpres yang dikeluarkan oleh presiden yang telah menjabat di Indonesia.

c) Media Cetak:

Sedangkan untuk sumber yang berasal dari media cetak penulis mendapatkannya di Balai Iklan Pikiran Rakyat dan Badan Arsip Daerah Jawa Barat yang ada di Bandung. Kertasnya sudah menguning karena sudah lama, tulisannya menggunakan tinta hitam dan ada beberapa lembar koran yang sulit terbaca karena sudah lama. Karena sumber yang berasal dari media cetak ini merupakan bagian dari arsip, maka penulis hanya bisa memfotonya, sehingga sumber ini merupakan sumber primer turunan karena telah diphoto terlebih dahulu.

d) Sumber lisan

Sumber lisan yang penulis dapatkan merupakan sumber lisan yang memiliki hubungan dengan penelitian yang penulis bahas, sehingga sumber lisan yang didapatkan sangat membantu penulis dalam menyusun penelitian ini.

b. Kritik Intern

Sementara itu, dalam proses kritik internal yang dilakukan untuk menentukan kredibilitas sumber dalam penulisan makalah ini, yaitu dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1) meneliti sifat dari sumber yang digunakan, apakah bersifat resmi atau tidak? 2) meneliti sumber tersebut dari aspek mental penulisnya dan apakah penulis sumber tersebut mau atau tidak dalam

menyampaikan informasi yang dimilikinya? 3) membandingkan dengan sumber yang lain, 4) melakukan korbokasi atau saling mendukung antar sumber yang tersedia.¹⁷ Dengan melakukan kritik tersebut, penulis dapat menentukan *shahih* tidaknya bukti atau fakta sejarah dari sumber yang didapatkan.

1) Sumber Primer:

a) Buku:

- (1) Siswono Jokohusodo. 1985. *Warga Baru, Kasus Cina di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Yayasan Padamu Negeri.
- (2) Junus Jahja. 1983. *Garis Rasial Garis Usang, Lika-liku Pembaharuan*. Jakarta: BAKOM PKB.
- (3) Ellyasa KH. Darwis. 1994. *Gus Dur: NU dan Masyarakat Sipil*. Yogyakarta: LKiS.
- (4) Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam. 1997. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- (5) M. Shaleh Isre. 1998. *Tabayun Gus Dur: Pribumisasi Islam, Hak Minoritas, Reformasi Kultural*. Yogyakarta: LKiS.
- (6) Ahmad Amir Aziz. 1999. *Neo-modernisme Islam di Indonesia Gagasan Sentral Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

¹⁷ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notokusanto, (Jakarta: UI Press, 1973), hlm. 114.

- (7) Al-Zastrow N.G, 1999, *Gus Dur Siapasih Sampeyan: Tafsir Teoritik atas Tindakan dan Pernyataan Gus Dur*, Jakarta: Erlangga.
- (8) Riza Sihbudi, 2000, *Bara dalam Sekam: Identifikasi Masalah dan Solusi ata Konflik-konflik Lokal di Aceh, Maluku, Papua dan Riau*, Bandung: Mizan.
- (9) M. Isa Sulaiman. 2000. *Aceh Merdeka Ideologi, Kepemimpinan dan Gerakan*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- (10) Leo Suryadinata. 2000. *Negara dan Etnis Tionghoa Kasus Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- (11) Budiarto Danudjaja. 2001. *Hari-hari Indonesia Gus Dur*. Yogyakarta: Galang Press.
- (12) Sri Bintang Pamungkas, 2001, *Dari Orde Baru ke Indonesia Baru lewat Reformasi Total*, Jakarta: Erlangga.
- (13) Setiono G Benny. 2002. *Tionghoa dalam Pusaran Politik*. Jakarta: Elkasa.
- (14) Abdul Ghofur. 2002. *Demokratisasi dan Prospek Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- (15) Greg Barton. 2003. *The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*. Yogyakarta: LKiS.
- (16) Hasanuddin Yusuf Adan. 2003. *Tamaddun dan Sejarah: Etnografi Kekerasan di Aceh*. Yogyakarta: Prisma Sophie Pers.

- (17) H. Hasan Bashri. 2003. *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh, Problem, Solusi dan Implementasi*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- (18) Pahrurroji M. Bukari. 2003. *Membebaskan Agama dari Negara: Pemikiran Abdurrahman Wahid dan Ali 'Abd ar-Raziq*. Jakarta: Pondok Edukasi.
- (19) A. Rani Usman. 2003. *Sejarah Peradaban Aceh*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- (20) P. N. H Simajuntak. 2003. *Kabinet-kabinet Republik Indonesia: dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi*. Jakarta: Djabatan.
- (21) A. Muhaimin Iskandar. 2004. *Gus Dur yang Saya Kenal: Sebuah Catatan Tentang Transisi Demokrasi Kita*. Yogyakarta: LKiS.
- (22) Listiyono Santoso. 2004. *Teologi Politik Gus Dur*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- (23) Anthony Reid. 2005. *Asal Mula Konflik Aceh*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- (24) Subarso. 2006. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- (25) Wayne Parsons. 2008. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Ananlisis Kebijakan*, ed. I, cet. Ke-3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Semua buku yang penulis dapatkan merupakan buku-buku yang sezaman dengan peristiwa yang diteliti oleh penulis, dan buku-buku tersebut juga berkaitan dengan penelitian yang sedang penulis teliti. Beberapa dari penulis buku tersebut

merupakan orang yang berkaitan langsung dengan Gus Dur, misalnya seperti Al-Zastrow N.G, yang beberapa kali medampingi Gus Dur dalam beberapa acara kenegaraan, maka dari itu buku yang disusun oleh Al-Zastrow N.G patut dijadikan sebagai sumber rujukan.

b) Arsip dan dokumen:

- (1) UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah.
- (2) UU No. 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi dan internet.
- (3) UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers yang menghilangkan SIUP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers).
- (4) UU No. 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan provinsi daerah Istimewa Aceh.
- (5) Keppres No. 153 Tahun 1999 tentang membentuk badan informasi dan komunikasi menggantikan UU sebelumnya.
- (6) Keppres No. 6 Tahun 2000 tentang pencabutan instruksi presiden nomor 14 tahun 1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat cina.
- (7) Inpres No.4 tahun 2001 tentang langkah-langkah komprehensif dalam rangka penyelesaian masalah Aceh.
- (8) Inpres No. 6 Tahun 2001 tentang Penggunaan dan pendayagunaan telematika.

Sumber arsip yang didapatkan adalah arsip yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, sehingga arsip ini sangat membantu penulis dalam menyusun penelitian yang dilakukan.

c) Media Cetak:

Sumber yang penulis kumpulkan tidak hanya dari satu media cetak saja, namun dengan beberapa media cetak lainnya. Sehingga dapat dijadikan perbandingan dan penguat terhadap berita yang diterbitkan oleh media-media cetak tersebut. Sumber media cetak yang penulis dapatkan merupakan sumber yang sezaman dan berkaitan dengan kebijakan yang dikeluarkan presiden Gus Dur yang sedang penulis teliti, yaitu kisaran antara tahun 1999-2001.

d) Sumber Lisan

Semua narasumber yang diwawancarai merupakan orang-orang yang sezaman dengan Gus Dur dan mereka adalah orang-orang yang berada dilingkungan NU, sehingga mereka mengerti alasan mengapa Gus Dur mengambil beberapa keputusan atau kebijakan yang menurut sebagian orang tidak konsisten dan kontroversi karena selalu menimbulkan banyak tanya.

3. Interpretasi

Tahapan yang ketiga adalah interpretasi atau penafsiran, yaitu proses penafsiran sejarah dari sumber-sumber yang telah diverifikasi. Penafsiran ini dapat berupa analisis atau menguraikan maupun sintesis atau menyatukan berbagai fakta. Fakta-fakta yang didapat dari hasil kritik di atas, kemudian penulis interpretasikan sehingga dalam memahami permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini dapat ditarik garis besarnya.

Kebijakan adalah suatu keputusan yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintah untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat disini merupakan keseluruhan kepentingan yang utuh dari perpaduan pendapat, keinginan, dan tautan

yang disampaikan kepada pemerintah.¹⁸ Dalam lingkungan kebijakan seperti dengan adanya kriminal, pengangguran, krisis ekonomi, serta adanya gejolak politik yang ada pada suatu negara yang mempengaruhi atau memaksa pelaku atau aktor untuk meresponnya, yakni memasukkan ke dalam agenda pemerintah dan selanjutnya kebijakan politik yang memecahkan masalah-masalah yang terjadi.¹⁹ Sedangkan Kontroversial menurut KBBI (kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah sesuatu yang bersifat menimbulkan perdebatan, karena pandangannya yang radikal.²⁰ Tindakan Gus Dur yang dianggap kontroversial ini diungkapkan oleh beberapa tokoh, diantara yaitu;

“...Meminjam julukan kepada Ronaldo, pemain Inter Milan yang disebut sebuah “fenomena dalam sepak bola”, maka didunia politik Indonesia Gus Dur bisa disebut “fenomena”. Ketika pemerintahan Orba masih kukuh, Gus Dur yang ketua PBNU membuat forum demokrasi (fordem) yang tentu saja membuat pro kontra, suara-suara keraspun meluncur dari Gus Dur yang membidik pemerintahan Soeharto”²¹

“...Prof. Azyumardi Azra, rektor IAIN Jakarta, menyatakan niatan Gus Dur untuk menyelesaikan masalah malah membuat masalah baru; “Gus Dur sendiri problematis, Gus Dur *part of the problem*. Dia bukan interpretasi atau mempresentasikan umat Islam tetapi mempresentasikan PKB”, katanya seperti dikutip dari tabloid Abadi, no. 8 tahun 1.”²²

Dari kutipan diatas, kita dapat mengetahui bahwa Gus Dur adalah sosok yang unik, baik dari tindakan maupun cara berfikirnya, sehingga tidak mengherankan bahwa banyak kalangan yang pro dan kontra terhadap apa yang ia lakukan.

¹⁸ Laurentius Rigen Daris, *Kebijakan-kebijakan Presiden Abdurahaman...*, hlm. 17.

¹⁹ Subarso, *Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 14.

²⁰ <http://kbbi.kemdikbud.go.id>. Diakses pada tanggal 02 Desember 2017, pukul 16:29.

²¹ Penulis Hikmah, “Mencermati Manuver Gus Dur”, Hikmah 16 Januari 1999, ed. Minggu 1, hlm. 6.

²² Penulis Hikmah, “Mencermati Manuver Gus Dur”, Hikmah 16 Januari 1999, ed. Minggu 1, hlm. 6.

Kebijakannya yang paling diingat dan menyita banyak perhatian publik hingga saat ini adalah dengan dibubarkannya Departemen Penerangan yang dianggap memiliki sangkut paut dengan pemerintahan Orde Lama, penyelesaian konflik di Aceh dengan adanya nota kesepahaman dengan GAM dan keputusan Presiden No. 6 tahun 2000 mengenai Pemulihan Hak Sipil bagi Etnis Cina. Aktivitas Etnis Cina yang pada beberapa pemerintahan sebelumnya dibatasi, maka dengan adanya Keppres No. 6 dapat memiliki kebebasan dalam menganut agama maupun menggelar budayanya secara terbuka seperti misalnya pertunjukan Barongsai.

Dari fakta-fakta yang telah dipaparkan diatas dapat diketahui bahwa semua kebijakan Gus Dur sebagai presiden mendapat sorotan dari berbagai kalangan, karena sikap dan tanggapannya pula kontroversial membuat ia menjadi bahan buruan para wartawan. Kebijakan yang diambilnya membuat orang terheran-heran sehingga menimbulkan banyak tanggapan yang berbeda. Selain seorang presiden Gus Dur adalah seorang tokoh masyarakat yang sangat disegani dan mendapat sorotan dari berbagai kalangan karena kekhasan dan keunikannya.

4. Hitoriografi

Historiografi adalah proses penyusunan fakta sejarah dan berbagai sumber yang telah diseleksi dalam bentuk penulisan sejarah. Setelah melakukan penafsiran terhadap data-data yang ada, sejarawan harus mempertimbangkan struktur dan gaya bahasa penulisannya. Sejarawan harus menyadari dan berusaha agar orang lain dapat memahami pokok-pokok pemikiran yang diajukan.²³

²³ Sulasman, *Metodelogi Penelitian Sejarah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 147.

Dalam tahapan historiografi ini penulis akan memaparkan hasil dari berbagai penemuan dari lapangan dan setelah melakukan berbagai proses penelitian dengan beberapa metode yang dilakukan oleh penulis. Untuk memudahkan penulisan, maka diperlukan sistematika penulisan. Untuk itu penulis membagi materi kedalam beberapa bab diantaranya yaitu:

BAB I, bab ini terdiri dari pendahuluan yang meliputi; latar belakang masalah,

rumusan masalah, tujuan pembahasan, kajian pustaka dan metode penelitian

BAB II, berisi rumusan masalah pertama yang meliputi; Biografi K. H.

Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dengan sub judul Riwayat Hidup Gus Dur yang meliputi; Latar belakang keluarga, pendidikan Gus Dur, perjalanan karir, karya-karya Gus Dur, penghargaan, sub selanjutnya yaitu membahas Gus Dur dengan Nahdatul Ulama dan Gus Dur sebagai Presiden Republik Indonesia.

BAB III, berisi rumusan masalah kedua yang meliputi; Kebijakan-kebijakan

Presiden K. H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang Kontroversial Tahun 1999-2001, yang dibagi menjadi beberapa sub pembahasan yaitu, pengertian kebijakan, faktor penentu kebijakan, dan pengertian kontroversial, kebijakan presiden Gus Dur dalam pembubaran Departemen Penerangan: sebab, proses, implikasi dan pro-kontra, kebijakan penandatanganan nota kesepahaman (JoU) Pemerintah Republik (RI) Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM): sebab, proses, implikasi dan pro-kontra dari kebijakan tersebut, dan kebebasan beragama

bagi Etnis Cina: sebab, proses, implikasi dan pro-kontra dari kebijakan tersebut.

BAB IV, berisi Penutup yang meliputi kesimpulan dari rumusan masalah yang telah dipaparkan dan saran.

